



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 4/ TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP NAGARI YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Nagari adalah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Bagi Hasil Pajak Daerah Minimal dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Minimal, selanjutnya disingkat dengan BHPDM dan BHRDM dana yang diperuntukkan bagi Nagari yang dibagi secara merata untuk setiap Nagari.
8. Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional, selanjutnya disingkat dengan BHPDP dan BHRDP dana yang diperuntukkan bagi Nagari yang dibagi secara merata untuk setiap Nagari berdasarkan nilai bobot Nagari yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.
9. Jumlah Nagari adalah jumlah Nagari yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya di singkat RKN adalah Rekening Kas Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
13. Bagi Hasil Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

14. Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah atas pelayanan dan fasilitas yang telah diberikan kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

BAB II

PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian Hasil Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah untuk Nagari setiap tahun anggaran.
- (2) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Hasil Pajak Daerah dan dan Retribusi Daerah.
- (3) Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk masing-masing Nagari merupakan hasil penjumlahan dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Minimal dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional.
- (4) Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Nagari Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 5.397.938.538,40 (Lima milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah empat puluh sen).

BAB III

TATA CARA PEMBAGIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap Nagari dihitung berdasarkan azas merata dan berkeadilan yaitu :
 - a. Azas merata adalah besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang sama untuk setiap Nagari selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Minimal; dan
 - b. Azas adil adalah besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang dibagi secara proporsional untuk setiap Nagari berdasarkan jumlah penduduk setiap nagari, jumlah penduduk miskin setiap Nagari, luas wilayah setiap Nagari dan indeks kesulitan geografis setiap Nagari yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Nagari Proporsional.

Pasal 4

Besaran persentase perbandingan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Minimal dengan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional dalam Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah :

- a. Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang dibagi rata untuk setiap Nagari;
- b. Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk setiap Nagari, jumlah penduduk miskin setiap Nagari dan luas wilayah setiap Nagari dan indeks kesulitan geografis dengan kriteria sebagai berikut :

$$AF = (0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4) \times \text{Nagari}$$
 Keterangan:
 - AF = Alokasi Formula setiap Nagari
 - Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Nagari terhadap total penduduk Nagari Kabupaten Pesisir Selatan
 - Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Nagari terhadap total penduduk miskin Nagari Kabupaten Pesisir Selatan
 - Z3 = rasio luas wilayah setiap Nagari terhadap luas wilayah Nagari Kabupaten Pesisir Selatan
 - Z4 = rasio IKG setiap Nagari terhadap total IKG Nagari Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang meneyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan/atau lembaga meneyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

- (1) Anggaran penerimaan dan pengeluaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun yang bersangkutan.
- (2) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari.
- (3) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari dilaksanakan secara bertahap setiap Triwulan.
- (4) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Nagari setelah Bupati menerima Peraturan Nagari mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

BAB V

PENGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dapat digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, bidang pembangunan Nagari, bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari, bidang pemberdayaan masyarakat Nagari, dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Nagari.
- (2) Pengelolaan keuangan Nagari Tahun Anggaran dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

BAB VI

PELAPORAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah satu kesatuan dengan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setiap semester tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli tahun berjalan melalui camat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikut.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA NAGARI

Pasal 9

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
- (4) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (4); dan

- b. Terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas intern di daerah atau Tim Penyelesaian Masalah/Konflik Pemerintahan Nagari.
- (2) Penundaan penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah bulan berikutnya tahun anggaran berjalan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 31 Desember 2019
BUPATI PESISIR SELATAN



Diundangkan di Painan
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN


ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 4/ TAHUN 2019
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP NAGARI
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Bagi Hasil Pajak daerah	Bagi Hasil Retribusi Daerah	PMU-2 (170 %)	Total
			(4)	(5)	(6)	(7)
1	PANCUNG SOAL	INDERAPURA	14.196.300,00	7.490.000,00	16.584.000,00	38.270.300,00
2		MUARO SAKAI INDERAPURA	14.247.100,00	7.516.900,00	5.509.700,00	27.273.700,00
3		TIGA SEPAKAT INDERAPURA	12.676.100,00	6.688.000,00	4.289.000,00	23.653.100,00
4		INDERAPURA BARAT	13.416.300,00	7.078.500,00	2.253.500,00	22.748.300,00
5		KUDO-KUDO INDERAPURA	15.408.400,00	8.129.600,00	6.634.100,00	30.172.100,00
6		INDERAPURA SELATAN	15.142.300,00	7.989.100,00	6.004.000,00	29.135.400,00
7		SIMPANG LAMA INDERAPURA	13.194.800,00	6.961.700,00	10.229.000,00	30.385.500,00
8		TIGO SUNGAI INDERAPURA	14.002.100,00	7.387.600,00	3.653.100,00	25.042.800,00
9		TULUK AMPLU INDERAPURA	12.794.000,00	6.750.200,00	9.793.800,00	29.338.000,00
10		INDERAPURA TENGAH	14.133.000,00	7.456.600,00	7.100.400,00	28.690.000,00
11	RANAH PESISIR	PELANGAI	13.000.100,00	6.858.900,00	13.747.400,00	33.606.400,00
12		SUNGAI TUNU	14.817.500,00	7.817.800,00	13.148.400,00	35.783.700,00
13		SUNGAI TUNU UTARA	16.011.300,00	8.447.700,00	16.374.900,00	40.833.900,00
14		SUNGAI TUNU BARAT	14.200.300,00	7.492.200,00	19.983.400,00	41.675.900,00
15		NYUR MELAMBAI PELANGAI	14.703.200,00	7.757.500,00	24.174.100,00	46.634.800,00
16		SUNGAI LIKU PELANGAI	16.499.900,00	8.705.500,00	15.913.100,00	41.118.500,00
17		KOTO VIII PELANGAI	16.315.500,00	8.608.200,00	19.227.300,00	44.151.000,00
18		PELANGAI GADANG	13.451.400,00	7.097.000,00	9.633.400,00	30.181.800,00
19		PELANGAI KACIAK	13.760.100,00	7.259.900,00	10.724.500,00	31.744.500,00
20		PASIA PELANGAI	14.777.800,00	7.796.800,00	19.358.100,00	41.932.700,00
21	LENGAYANG	KAMBANG	18.412.600,00	9.714.600,00	32.802.100,00	60.729.300,00
22		LAKITAN	15.429.100,00	8.140.500,00	15.539.700,00	39.109.300,00
23		KAMBANG UTARA	20.539.100,00	10.836.500,00	32.838.400,00	64.214.000,00
24		KAMBANG TIMUR	19.339.500,00	10.203.600,00	17.935.300,00	47.478.400,00
25		KAMBANG BARAT	18.518.800,00	9.770.600,00	31.614.400,00	59.903.800,00
26		LAKITAN UTARA	16.474.300,00	8.691.900,00	17.195.000,00	42.361.200,00
27		LAKITAN SELATAN	18.791.400,00	9.914.400,00	15.353.000,00	44.058.800,00
28		LAKITAN TIMUR	13.456.300,00	7.099.600,00	6.816.200,00	27.372.100,00
29		LAKITAN TENGAH	15.279.500,00	8.061.500,00	11.199.700,00	34.540.700,00
30		IV KOTO HILE	19.669.700,00	10.377.800,00	26.496.700,00	56.544.200,00
31	TANG KAPAS	IV KOTO MUDIEK	12.985.800,00	6.851.400,00	9.873.500,00	29.710.700,00
32		TALUAK	13.565.600,00	7.157.300,00	7.287.900,00	28.010.800,00
33		KOTO NAN DUO IV KOTO HILE	17.374.500,00	9.166.900,00	11.782.800,00	38.334.200,00
34		KOTO NAN TIGO IV KOTO HILE	14.733.500,00	7.773.400,00	7.175.600,00	29.682.500,00
35		TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK	14.750.500,00	7.782.400,00	3.823.100,00	26.356.000,00
36		TULUK IV KOTO MUDIEK	13.198.200,00	6.963.400,00	9.568.300,00	29.729.900,00

20.	Revisi/Amendemen	Nama Desa	Bagi Justifikasi daerah	Bagi Justifikasi Daerah	Pada Rp2 (70%)	Total
37	B A	SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK	14.070.400,00	7.423.600,00	9.297.700,00	30.791.700,00
38		TALUK TIGO SAKATO	13.152.800,00	6.939.500,00	9.493.000,00	29.585.300,00
39		PAINAN	12.860.400,00	6.785.200,00	32.425.400,00	52.071.000,00
40		TAMBANG	13.327.500,00	7.031.700,00	3.529.700,00	23.888.900,00
41		SALIDO	16.525.800,00	8.719.100,00	26.445.000,00	51.639.900,00
42		LUMPO	11.768.300,00	6.209.000,00	3.237.900,00	21.215.200,00
43		BUNGA PASANG SALIDO	15.617.400,00	8.239.800,00	10.012.600,00	33.869.800,00
44		SAGO SALIDO	13.872.600,00	7.319.300,00	21.340.900,00	42.532.800,00
45		SALIDO SARI BULAN	13.601.500,00	7.176.200,00	2.955.700,00	23.733.400,00
46		KOTO RAWANG	13.427.000,00	7.084.200,00	2.561.600,00	23.072.800,00
47	IV JURAI	LIMAU GADANG LUMPO	13.469.400,00	7.106.500,00	2.236.700,00	22.812.600,00
48		BATU KUNIK LUMPO	12.292.300,00	6.485.500,00	2.514.400,00	21.292.200,00
49		TARATAK TANGAH LUMPO	13.471.200,00	7.107.400,00	2.708.000,00	23.286.600,00
50		AMPUAN LUMPO	12.136.300,00	6.403.100,00	1.926.800,00	20.466.200,00
51		AMPANG TAREH LUMPO	12.377.500,00	6.530.500,00	3.831.300,00	22.739.300,00
52		BALAI SINAYAN LUMPO	12.012.900,00	6.338.100,00	2.594.000,00	20.945.000,00
53		SUNGAI GAYO LUMPO	11.674.500,00	6.159.500,00	2.529.200,00	20.363.200,00
54		BUKIK KACIAK LUMPO	12.496.500,00	6.285.500,00	1.700.800,00	19.899.500,00
55		GUNUNG BUNGKUAK LUMPO	12.831.500,00	6.770.000,00	2.743.300,00	21.833.000,00
56		PAINAN SELATAN PAINAN	13.916.200,00	7.342.300,00	1.458.000,00	21.039.500,00
57	BAYANG	PAINAN TIMUR PAINAN	13.829.500,00	7.296.500,00	18.041.200,00	39.167.200,00
58		KOTO BERAPAK	12.609.800,00	6.653.000,00	6.123.400,00	25.386.200,00
59		TALAOK	15.248.700,00	8.045.300,00	4.826.200,00	28.120.200,00
60		PASAR BARU	14.649.500,00	7.729.100,00	5.167.800,00	27.546.400,00
61		GURUN PANJANG	12.400.900,00	6.542.800,00	5.251.100,00	24.194.800,00
62		API-API PASAR BARU	13.213.000,00	6.971.300,00	3.675.900,00	23.860.200,00
63		TANJUNG DURIAN PASAR BARU	13.273.200,00	7.003.000,00	3.171.200,00	23.447.400,00
64		ASAM KAMBA PASAR BARU	14.083.100,00	7.430.300,00	4.479.700,00	25.993.100,00
65		SAWAH LAWEH PASAR BARU	14.170.400,00	7.476.400,00	6.794.800,00	28.441.600,00
66		KAPEH PANJI JAYA TALAOK	14.491.900,00	7.646.000,00	4.368.900,00	26.506.800,00
67	BAYANG	AUR BEGALUNG TALAOK	13.446.800,00	7.094.600,00	6.341.200,00	26.882.600,00
68		KAPELGAM KOTO BERAPAK	14.211.100,00	7.497.800,00	5.134.500,00	26.843.400,00
69		KOTO BARU KOTO BERAPAK	13.452.600,00	7.097.700,00	2.941.900,00	23.492.200,00
70		KUBANG KOTO BERAPAK	12.413.600,00	6.549.500,00	6.404.600,00	25.367.700,00
71		KAPUJAN KOTO BERAPAK	14.214.800,00	7.499.800,00	3.992.100,00	25.706.700,00
72		GURUN PANJANG UTARA	14.938.300,00	7.881.500,00	7.238.500,00	30.058.300,00
73		GURUN PANJANG BARAT	12.286.700,00	6.482.500,00	3.641.000,00	22.410.200,00
74		GURUN PANJANG SELATAN	13.132.500,00	6.928.800,00	4.433.600,00	24.494.900,00
75		SIGUNTUR	13.886.100,00	7.326.300,00	4.816.300,00	26.028.700,00
76		SUNGAI PINANG	14.809.300,00	7.813.500,00	2.292.200,00	24.915.000,00
77	BAYANG	DUKU	19.327.700,00	10.197.400,00	8.237.400,00	37.762.500,00
78		BATU HAMPA	14.227.000,00	7.506.200,00	5.859.700,00	27.592.900,00
79						

No.		Nama Desa		Bagi Hasil Pajak Daerah		Bagi Hasil Retribusi Daerah		PDB-P2 (70 %)		Total	
Kecamatan											
KOTO XI TARUSAN		NANGGALO		14.047.000,00		7.411.300,00		6.179.100,00		27.637.400,00	
		AMPANG PULAI		14.537.700,00		7.670.100,00		4.434.000,00		26.641.800,00	
		KAPUH		17.338.100,00		9.147.700,00		6.623.300,00		33.109.100,00	
		BARUNG-BARUNG BALANTAI		12.702.100,00		6.701.700,00		10.717.400,00		30.121.200,00	
		BARUNG-BARUNG BALANTAI SELATAN		12.494.200,00		6.592.000,00		5.056.800,00		24.143.000,00	
		MANDEH		14.836.600,00		7.827.800,00		4.017.300,00		26.681.700,00	
		KAPUAH UTARA		13.581.700,00		7.165.800,00		2.680.900,00		23.438.400,00	
		TARATAK SUNGAI LUNDANG		15.657.100,00		8.260.800,00		1.928.100,00		25.846.000,00	
		SIGUNTUR TUA		11.909.100,00		6.283.300,00		1.327.600,00		19.520.000,00	
		KAMPUNG BARU KORONG NAN AMPEK		15.285.200,00		8.064.500,00		3.644.400,00		26.994.100,00	
SUTERA		DUKU UTARA		13.654.600,00		7.204.200,00		7.093.500,00		27.952.300,00	
		PULAU KARAM AMPANG PULAI		13.804.300,00		7.283.200,00		2.948.000,00		24.035.500,00	
		JINANG KAMPUNG PANSUR AMPANG PULAI		14.087.400,00		7.432.600,00		3.638.500,00		25.158.500,00	
		CEROCOK ANAU AMPANG PULAI		11.972.600,00		6.316.800,00		4.514.900,00		22.804.300,00	
		SUNGAI NYALO MUDIAK AIA		13.525.400,00		7.136.100,00		9.114.600,00		29.776.100,00	
		BATU HAMPAR SELATAN		14.404.200,00		7.599.700,00		2.278.900,00		24.282.800,00	
		BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR		13.550.900,00		7.149.500,00		2.779.700,00		23.480.100,00	
		BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH		12.557.900,00		6.625.600,00		4.178.600,00		23.362.100,00	
		SETARA NANGGALO		14.353.000,00		7.572.700,00		8.841.100,00		30.766.800,00	
		TARATAK		13.899.500,00		7.333.400,00		6.176.000,00		27.408.900,00	
LINGGO SARI BAGANTI		SURANTIH		18.555.700,00		9.790.100,00		16.113.400,00		44.459.200,00	
		AMPING PARAK		20.589.800,00		10.863.300,00		34.318.300,00		65.771.400,00	
		AMPING PARAK TIMUR		16.360.300,00		8.631.800,00		19.623.900,00		44.616.000,00	
		KOTO TARATAK		12.893.300,00		6.802.600,00		5.918.600,00		25.614.500,00	
		LANSANO TARATAK		14.169.700,00		7.476.000,00		11.068.500,00		37.306.200,00	
		AIR DURI SURANTIH		17.175.700,00		9.062.000,00		9.713.200,00		40.692.400,00	
		RAWANG GUNUNG MALELO SURANTIH		20.279.600,00		10.699.600,00		8.295.600,00		29.183.000,00	
		KOTO NAN TIGO SELATAN SURANTIH		15.723.100,00		8.295.600,00		6.383.700,00		29.524.300,00	
		KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH		14.918.300,00		7.871.000,00		8.247.200,00		30.440.300,00	
		GANTING MUDIAK SELATAN SURANTIH		13.928.400,00		7.348.700,00		3.798.900,00		26.295.200,00	
LINGGO SARI BAGANTI		GANTING MUDIAK UTARA SURANTIH		17.440.000,00		9.201.400,00		5.240.700,00		26.905.400,00	
		PUNGASAN		13.782.700,00		7.271.800,00		6.814.300,00		35.577.900,00	
		AIR HAI		13.152.000,00		6.939.100,00		12.481.300,00		31.300.700,00	
		PUNGASAN UTARA		15.119.500,00		7.977.100,00		8.770.700,00		30.636.300,00	
		PUNGASAN TIMUR		14.748.600,00		7.781.400,00		7.561.300,00		24.341.800,00	
		PADANG XI PUNGASAN		15.039.900,00		7.935.100,00		5.209.100,00		29.913.800,00	
		LAGAN MUDIK PUNGASAN		12.524.600,00		6.608.100,00		9.700.700,00		31.733.900,00	
		LAGAN HILIR PUNGASAN		13.231.900,00		6.981.200,00		6.068.400,00		27.878.500,00	
		AIR HAI TENGGARA		16.259.200,00		8.578.400,00		6.109.400,00		25.594.900,00	
		PASAR LAMA MUARA AIR HAI		14.277.300,00		7.532.800,00		4.746.100,00		28.743.500,00	
LINGGO SARI BAGANTI		PASAR BUKIT AIR HAI		14.006.000,00		7.389.600,00		6.085.500,00			
		AIR HAI BARAT		13.648.000,00		7.200.800,00					
		AIR HAI TENGAH		14.832.400,00		7.825.600,00					

No.	Kecamatan	Nama Desa	Bagian dari Pajak daerah		Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10%)	Total
			Bagian dari Pajak daerah	Bagian dari Pajak daerah		
123		RANTAU SIMALENANG AIR HAI	14.268.200,00	7.528.000,00	10.743.100,00	32.539.300,00
124		MUARA GADANG AIR HAI	13.967.300,00	7.369.200,00	3.510.800,00	24.847.300,00
125		SUNGAI SIRAH AIR HAI	13.222.200,00	6.976.100,00	4.292.300,00	24.490.600,00
126		MUARA KANDIS PUNGASAN	12.975.800,00	6.846.100,00	2.605.100,00	22.427.000,00
127		LUNANG	14.838.800,00	7.829.000,00	7.844.100,00	30.511.900,00
128	LUNANG	LUNANG UTARA	13.579.800,00	7.164.800,00	2.170.300,00	22.914.900,00
129		LUNANG SELATAN	12.398.800,00	6.541.700,00	2.769.000,00	21.709.500,00
130		LUNANG BARAT	12.019.400,00	6.341.500,00	3.978.400,00	22.339.300,00
131		SINDANG LUNANG	12.421.700,00	6.553.800,00	7.179.300,00	26.154.800,00
132		PONDOK PARIAN LUNANG	11.851.900,00	6.253.100,00	5.742.900,00	23.847.900,00
133		LUNANG TENGAH	12.413.800,00	6.549.600,00	9.469.800,00	28.433.200,00
134		LUNANG SATU	12.030.400,00	6.347.300,00	22.211.700,00	40.589.400,00
135		LUNANG DUA	12.814.900,00	6.761.200,00	21.972.400,00	41.548.500,00
136		LUNANG TIGA	12.166.400,00	6.419.000,00	14.796.100,00	33.381.500,00
137		TAPAN	13.001.900,00	6.859.900,00	1.418.700,00	21.280.500,00
138	BASA AMPEK BALAI TAPAN	PASAR TAPAN	11.153.900,00	5.884.800,00	4.220.300,00	21.259.000,00
139		BATANG ARAH TAPAN	12.899.200,00	6.805.700,00	4.586.000,00	24.290.900,00
140		AMPANG TULAK TAPAN	12.254.800,00	6.465.700,00	1.928.600,00	20.649.100,00
141		TANJUNG PONDOK TAPAN	13.063.700,00	6.892.500,00	3.235.200,00	23.191.400,00
142		BATANG BETUNG TAPAN	12.076.700,00	6.371.700,00	3.487.900,00	21.936.300,00
143	AMPEK NAGARI BAYANG UTARA	BUKIT BUAI TAPAN	11.935.000,00	6.297.000,00	1.712.200,00	19.944.200,00
144		RIAK DANAU TAPAN	13.253.200,00	6.992.400,00	3.146.400,00	23.392.000,00
145		KOTO ANAU TAPAN	12.177.500,00	6.424.900,00	3.622.400,00	22.224.800,00
146		DUSUN BARU TAPAN	12.189.300,00	6.431.200,00	3.831.400,00	22.451.900,00
147		PULUK-PULUK	15.428.400,00	8.140.100,00	3.683.500,00	27.252.000,00
148	AIRPURA	KOTO RANAH	12.810.300,00	6.758.800,00	3.181.100,00	22.750.200,00
149		MUARO AIE	12.065.300,00	6.365.700,00	1.837.200,00	20.268.200,00
150		PANCUANG TABA	13.815.900,00	7.289.300,00	3.356.100,00	24.461.300,00
151		PULUK-PULUK SELATAN	13.860.600,00	7.312.900,00	5.086.000,00	26.259.500,00
152		LIMAU GADANG PANCUNG TABA	14.540.200,00	7.671.500,00	1.870.400,00	24.082.100,00
153	HULU	INDERAPURA UTARA	12.145.100,00	6.407.800,00	9.093.900,00	27.646.800,00
154		MUARA INDERAPURA	12.551.400,00	6.622.200,00	7.228.000,00	26.401.600,00
155		DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA	12.593.600,00	6.644.500,00	11.016.800,00	30.254.900,00
156		LALANG PANJANG INDERAPURA	12.164.900,00	6.418.300,00	12.923.600,00	31.506.800,00
157		PALOKAN INDERAPURA	13.619.900,00	7.185.900,00	4.001.300,00	24.807.100,00
158		LUBUK BETUNG INDERAPURA	13.656.600,00	7.205.300,00	12.951.900,00	33.813.800,00
159		TIUK KUATO INDERAPURA	14.111.100,00	7.445.100,00	8.908.000,00	30.464.200,00
160		TANAH BAKALI INDERAPURA	14.591.700,00	7.698.700,00	10.191.900,00	32.482.300,00
161		INDERAPURA TIMUR	14.173.400,00	7.478.000,00	3.662.400,00	25.313.800,00
162		PULAU RAJO INDERAPURA	12.601.500,00	6.648.600,00	3.087.800,00	22.337.900,00
163		SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN	12.496.600,00	6.593.300,00	4.041.500,00	23.131.400,00
164		LIMAU PURUT TAPAN	12.281.800,00	6.479.900,00	3.553.000,00	22.314.700,00
165		TALANG BALARIK TAPAN	16.094.200,00	8.491.400,00	3.540.100,00	28.125.700,00

No.	Kecamatan	Nama Desa	Bagian Palak daerah	Bagian Bawah Daerah	70%-72 (70%)	Total
166	RANAH AMPEK TAPAN	TEBING TINGGI TAPAN	13.212.800,00	6.971.200,00	3.966.900,00	24.150.900,00
167		BINJAI TAPAN	12.062.600,00	6.364.300,00	5.472.000,00	23.898.900,00
168		SUNGAI PINANG TAPAN	13.482.700,00	7.113.500,00	3.408.400,00	24.004.600,00
169		TALANG KOTO PULAI TAPAN	12.785.600,00	6.745.800,00	3.415.200,00	22.946.600,00
170		KAMPUNG TENGAH TAPAN	12.521.500,00	6.606.400,00	2.927.000,00	22.054.900,00
171		KUBU TAPAN	12.732.100,00	6.717.500,00	3.824.600,00	23.274.200,00
172		SIMPANG GUNUNG TAPAN	12.925.700,00	6.819.700,00	3.829.100,00	23.574.500,00
173		SILAUT	15.053.800,00	7.942.500,00	13.449.200,00	36.445.500,00
174		SUNGAI SIRAH	12.447.500,00	6.567.400,00	7.221.800,00	26.236.700,00
175		SUNGAI SARIK	12.448.000,00	6.567.600,00	12.664.500,00	31.680.100,00
176	SILAUT	SUNGAI PULAI	12.453.600,00	6.570.600,00	16.617.700,00	35.641.900,00
177		PASIR BINJAI	12.076.800,00	6.371.800,00	11.537.100,00	29.985.700,00
178		TALANG BINJAI	11.769.400,00	6.209.600,00	11.404.100,00	29.383.100,00
179		DURIAN SERIBU	12.240.900,00	6.458.400,00	22.901.700,00	41.601.000,00
180		LUBUK BUNTA	11.945.600,00	6.302.600,00	13.350.600,00	31.598.800,00
181		AIR HITAM	12.392.000,00	6.538.100,00	17.048.000,00	35.978.100,00
182		SAMBUNGO	12.870.100,00	6.789.732,00	6.076.206,40	25.736.038,40
Total			2.541.250.000,00	1.340.776.132,00	1.515.912.406,40	5.397.938.538,40

